

**PENGARUH INVENTARISASI, KOMPETENSI APARATUR, DAN  
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP OPTIMALISASI  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**LISTIANI**

2017/17043017

JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi**

**Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi**

**Universitas Negeri Padang**

**Judul** : Pengaruh Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan  
Pengendalian Internal Terhadap Optimalisasi  
Pengelolaan Barang Milik Daerah

**Nama** : Listiani

**NIM/TM** : 17043017/ 2017

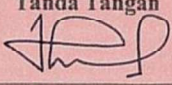
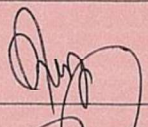

**Jurusan** : Akuntansi

**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik

**Fakultas** : Ekonomi

**Padang, Agustus 2022**

**Tim Penguji**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	Ketua	Henri Agustin, S.E., M.Sc., Ak.	1. 
2.	Anggota	Nurzi Sebrina, S.E., Ak., M.Sc.	2. 
3.	Anggota	Dr. Deviani, S.E., M.Si., Ak.	3. 

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PENGARUH INVENTARISASI, KOMPETENSI APARATUR, DAN  
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP OPTIMALISASI PENGELOLAAN  
BARANG MILIK DAERAH

Nama : Listiani  
NIM/TM : 17043017/2017  
Jurusan : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D  
NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Henri Agustin, S.E., M.Sc., Ak.  
NIP. 19771123 200312 1 003



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Listiani  
NIM/TM : 17043017/2017  
Tempat/Tanggal Lahir : Batang Kulim/ 8 November 1999  
Jurusan : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jalan Parkit 1, Air Tawar Barat  
No. HP/Telepon : 0823-8784-8240  
Judul Skripsi : Pengaruh Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Pengendalian Internal Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Agustus 2022

kan,  
  
METERA  
TEMPEL  
C1AJX907328475  
**Listiani**  
NIM. 17043017

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of inventory, the competence of apparatus, and internal control systems on optimizing the management of regional property. The population of this research is all Regional Apparatus Organizations in Pelalawan Regency. The sampling technique used was total sampling, where as many as 27 Regional Apparatus Organizations in Pelalawan Regency were used as research samples. From each Regional Apparatus Organizations, 4 people were taken as respondents, consisting of 1 Head of General Subdivision, 1 Head of Finance Subdivision, and 2 Managers of Goods, so that a total of 108 respondents were obtained. The data was collected by distributing questionnaires directly to the respondents. This research uses quantitative method and the data were processed using multiple linear regression analysis with the help of the IBM SPSS Statistic version 22. The results of statistical tests stated that the inventory had a positive and significant effect on the optimization of the management of regional property. Meanwhile, the competence of the apparatus and the internal control system has no significant effect on the optimization of the management of regional property.*

**Keywords:** *inventory; the competence of the apparatus; the internal control system; the optimization of the management of regional property.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel inventarisasi, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Populasi penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pelalawan. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, dimana sebanyak 27 OPD di Kabupaten Pelalawan dijadikan sampel penelitian. Dari setiap OPD diambil 4 orang sebagai responden, yang terdiri dari 1 orang Kepala Sub Bagian Umum, 1 orang Kepala Sub Bagian Keuangan, dan 2 orang Pengurus Barang, sehingga diperoleh total responden sebanyak 108 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data penelitian diolah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi *IBM SPSS Statistic* versi 22. Hasil uji statistik menyatakan bahwa inventarisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

**Kata Kunci:** inventarisasi; kompetensi aparatur; optimalisasi pengelolaan barang milik daerah; sistem pengendalian internal.

## LEMBAR PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah memberikanku kekuatan, serta membekaliku dengan ilmu dan iman. Atas kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Serta, shalawat dan salam selalu terlimpahkan ke haribaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang terkasih dan tersayang.

### **Ayahanda dan Ibunda Tercinta**

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ayah (Supirlan) dan Ibu (Sayem) yang telah memberikan kasih sayang, ridho, cinta kasih, serta dukungan moral dan materil yang tak terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia, karena 'ku sadar selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ayah dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi, selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik. Terima kasih Ayah, Ibu.

### **Saudaraku dan Orang Terdekatku**

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya ini untuk Saudaraku satu-satunya, Abang (Bagus Riawan). Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Kakak Iparku (Ayu Lestari), terima kasih telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyelesaian karya ini. Untuk keponakanku tersayang (Aqmar dan Ibrahim), kehadiran kalian sebagai sumber keceriaanku, *mood booster* dikala aku stres dan jenuh. Terima kasih.

### **Teman-Temanku**

Untuk teman-temanku yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dukungan, serta selalu memberiku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, terkhusus *roommate*-ku Nurshella, terima kasih telah selalu bersamaku melewati suka duka perkuliahan ini. Kepada sahabatku di kampus, Mega, Henny, dan Elisa, serta sahabat masa sekolahku, Iin, Dewi, dan Meri, terima kasih telah hadir dalam hidupku. Serta kawan-kawan Akuntansi '17 khususnya kelas A, terima kasih atas dukungan kalian.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Pengendalian Internal Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah” ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu pada Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D. selaku rektor Universitas Negeri Padang;
2. Bapak Dr. Idris, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang;
3. Ibu Sany Dwita, S.E., M.Si., Ak., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang;
4. Ibu Vita Fitria Sari, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang;
5. Bapak Henri Agustin, S.E., M.Sc., Ak. sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dan banyak memberi masukan serta saran kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi;
6. Ibu Nurzi Sebrina, S.E., Ak., M.Sc. selaku dosen penelaah proposal sekaligus dosen penguji I yang telah memberikan kritikan, saran, dan masukan kepada



penulis sehingga mampu menghasilkan skripsi yang lebih baik;

7. Ibu Dr. Deviani, S.E., M.Si., Ak. selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran dan masukan sehingga penulis mampu menghasilkan skripsi yang lebih baik;
8. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah selingkup Kabupaten Pelalawan, khususnya kepada Bapak/Ibu Kepala Sub Bagian Umum yang telah banyak memberikan bantuan selama proses penelitian;
9. Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan yang telah memberikan bantuan pendidikan kepada penulis;
10. Teristimewa untuk orang tua yang sangat penulis cintai serta saudara terkasih yang telah memberikan dukungan, do'a, dan semangat kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
11. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi 2017, khususnya Kelas A, terima kasih atas dukungan, saran, dan kebersamaan kita selama ini.
12. Serta terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kelemahan dan keterbatasan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi dan bermanfaat bagi pembaca.

Padang, September 2022

Penulis,  
Listiani

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	1
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Landasan Teori.....	14
1. Teori <i>Stewardship</i> .....	14
2. Teori Institusional .....	17
3. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	20
4. Inventarisasi.....	36
5. Kompetensi Aparatur .....	43
6. Sistem Pengendalian Internal .....	47
B. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu .....	55
C. Hubungan Antar Variabel untuk Pengembangan Hipotesis .....	63
D. Kerangka Konseptual .....	70
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>72</b>
A. Jenis Penelitian.....	72
B. Populasi dan Sampel .....	72
C. Jenis dan Sumber Data .....	74

D. Teknik Pengumpulan Data .....	74
E. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel .....	75
F. Instrumentasi Penelitian .....	77
G. Teknik Analisis Data .....	78
1. Statistik Deskriptif .....	79
2. Uji Kualitas Data .....	79
3. Uji Asumsi Klasik.....	80
4. Analisis Regresi Linear Berganda .....	82
5. Analisis Koefisien Determinasi .....	82
6. Uji Hipotesis.....	83
H. Definisi Operasional.....	84
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>86</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	86
B. Demografi Responden .....	87
C. Deskripsi Variabel Penelitian .....	91
D. Hasil Analisis Data.....	97
1. Hasil Statistik Deskriptif .....	97
2. Hasil Uji Kualitas Data .....	99
3. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	101
4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	105
5. Hasil Analisis Koefisien Determinasi.....	107
6. Hasil Uji Hipotesis.....	107
E. Pembahasan Hasil Penelitian .....	110
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	123
B. Keterbatasan Penelitian .....	123
C. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>131</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ikhtisar Penelitian Terdahulu .....	60
Tabel 2. Daftar Organisasi Perangkat Daerah .....	72
Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian .....	77
Tabel 4. Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	86
Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	87
Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	87
Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan .....	88
Tabel 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	89
Tabel 9. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja di Bidang Pengelolaan BMD.....	89
Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Diklat/Bimtek BMD.....	90
Tabel 11. Deskripsi Variabel Inventarisasi .....	91
Tabel 12. Deskripsi Variabel Kompetensi Aparatur .....	92
Tabel 13. Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Internal.....	94
Tabel 14. Deskripsi Variabel Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	96
Tabel 15. Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	98
Tabel 16. Hasil Uji Validitas.....	100
Tabel 17. Hasil Uji Reliabilitas .....	101
Tabel 18. Hasil Uji Normalitas .....	102
Tabel 19. Hasil Uji Multikolinearitas .....	103
Tabel 20. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	104
Tabel 21. Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	105
Tabel 22. Hasil Analisis Koefisien Determinasi .....	107
Tabel 23. Hasil Uji f .....	108
Tabel 24. Hasil Uji t .....	109

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1. Kerangka Konseptual ..... 71**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner .....	131
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian .....	137
Lampiran 3. Tanda Bukti Penelitian.....	140
Lampiran 4. Karakteristik Responden .....	145
Lampiran 5. Tabulasi Data Kuesioner .....	147
Lampiran 6. Statistik Deskriptif .....	153
Lampiran 7. Uji Kualitas Data .....	154
Lampiran 8. Uji Asumsi Klasik.....	160
Lampiran 9. Regresi Linear Berganda .....	161
Lampiran 10. Uji Hipotesis.....	162



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah membawa perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia. Jika sebelumnya sistem pemerintahan dilaksanakan secara terpusat atau sentralisasi, maka sejak diundangkannya UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 25/1999 sistem pemerintahan diubah menjadi desentralisasi. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri (Asman *et al.*, 2016).

Pemerintah daerah telah diberi keleluasaan untuk mengelola, mengembangkan, dan menggunakan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Astini, 2018). Pengaturan pemasukan dan pengeluaran dana tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat dan sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dirangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kewenangan otonomi daerah tersebut juga termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan barang milik daerah (BMD).

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, pengelolaan barang milik daerah (BMD) merupakan keseluruhan aktivitas yang mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan,

penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Barang milik daerah (BMD) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 merupakan seluruh barang yang diperoleh atau dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau diperoleh dari sumber lainnya yang sah. BMD terbagi atas barang bergerak (inventaris) dan barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) (Hartati *et al.*, 2019).

Pengelolaan BMD bertujuan untuk mendorong kelancaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemerintah dan menunjang pembangunan daerah, menciptakan akuntabilitas publik terkait aset daerah, serta menertibkan pengelolaan aset menjadi efektif dan efisien (Simamora, 2020). Pengelolaan aset daerah dikatakan optimal apabila telah dilakukan sesuai dengan petunjuk dan teknis pengelolaan BMD yang diatur dalam PP No. 28/2020 dan Permendagri No. 19/2016. Lebih lanjut, manajemen aset yang sempurna dapat dicapai ketika tidak ada lagi permasalahan atau penyelewengan aset.

Pengelolaan aset daerah di Indonesia dapat dikatakan belum optimal meskipun pemerintah daerah telah diberi kewenangan otonomi selama lebih dari 20 tahun. Menurut Kurniati *et al.*, (2017) kendala dalam penatausahaan aset tetap yang terjadi pada Kabupaten Dompu disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kuantitas dan kualitas pengelola aset, koordinasi yang kurang baik antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran, budaya organisasi yang cenderung “kekeluargaan” sehingga penerapan sanksi menjadi subjektif, komitmen pemimpin yang kurang tegas dalam menerapkan peraturan, dan insentif yang kurang sesuai dengan beban tugas. Simamora dan

Halim (2012) juga menyebutkan bahwa kelemahan pengelolaan aset daerah disebabkan oleh kurangnya bimbingan teknis terkait pengelolaan aset, pimpinan yang kurang tegas, serta kurangnya sikap tanggung jawab, kepedulian, dan kesadaran dari pengguna dan pengurus aset daerah.

Hal di atas merupakan beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pengelolaan aset daerah di Indonesia. Minimnya pengelolaan BMD ini dapat dilihat dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang dirangkum dalam Indeks Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2020 yang menjelaskan bahwa terdapat 58 permasalahan terkait pengendalian internal dalam pengelolaan aset daerah. Adapun masalah SPI terkait aset daerah yakni pencatatan tidak akurat atau belum dilakukan, SOP/kebijakan/regulasi tidak lengkap atau belum disusun, kelemahan dalam mengelola fisik aset, dan lain sebagainya. Sementara itu, ditemukan pula masalah ketidakpatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan BMD sebanyak 79 permasalahan, diantaranya keberadaan aset tetap tidak diketahui, penerimaan belum dipungut/diterima, penyimpangan peraturan BMD, dan lain-lain.

Terkait dengan manajemen aset, BPK RI juga menemukan beberapa permasalahan. Pada Pemkab Karangasem pencatatan pemanfaatan dan pelaporan aset tetap belum seluruhnya dilengkapi penyajian dan pengungkapan peristiwa atau kejadian yang mendukung penyusunan neraca daerah. Sementara itu, pada Pemkab Badung pelaksanaan inventarisasi belum memadai dan belum meng-*update* informasi BMD secara akurat. Masalah-

masalah tersebut mengakibatkan pelaporan BMD tidak informatif dan tidak akurat dalam mendukung akuntabilitas LKPD, kartu inventaris barang (KIB) tidak mampu menyediakan informasi BMD secara lengkap dan andal, serta hasil inventarisasi BMD belum dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMD (BPK-RI, 2020).

Pada aspek pengamanan aset, Pemkab Kupang, Pemkab Lembata, dan Pemkab Ende belum melakukan pengamanan aset secara memadai. BPK RI dalam IHPS II tahun 2020 menemukan permasalahan dalam ketiga Pemkab tersebut yaitu adanya aset tanah belum bersertifikat dan belum ada proses pengurusan sertifikat kepemilikannya. Akibatnya, BMD berisiko hilang, dikuasai pihak lain secara tidak sah, disalahgunakan, menimbulkan sengketa, serta dapat diambil alih oleh pihak lain (BPK-RI, 2020).

Beberapa temuan BPK di atas relevan dengan temuan riset Kurniati *et al.* (2017) yang meneliti tentang kendala penatausahaan aset tetap di Kabupaten Dompu dengan metode kualitatif. Adapun permasalahan yang ditemukan di objek penelitian yakni pencatatan dan pelaporan aset tetap tidak didukung dengan data yang andal, aset tetap dikuasai pihak lain, aset tetap belum jelas statusnya dan bukti kepemilikan tidak lengkap, aset tetap belum diketahui keberadaannya, dan aset tanpa nilai (Kurniati *et al.*, 2017). Tidak jauh berbeda dengan Kota Palembang, permasalahan pengelolaan BMD masih dijumpai diantaranya data aset yang diinput tidak lengkap sehingga beberapa penyajian aset tetap bernilai Rp0,00, tidak adanya bukti kepemilikan aset, dan informasi lokasi aset tetap tidak diketahui (Hartati *et al.*, 2019; Ardiani, 2020).

Berbagai permasalahan pengelolaan BMD yang masih terjadi menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah di Indonesia belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika terus dibiarkan, hal ini dapat mengakibatkan permasalahan yang lebih serius. Barang milik daerah akan disajikan dalam laporan keuangan khususnya di neraca pemerintah daerah, jika tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyelewengan yang dapat merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) tidak terlaksana (JDIH Padang, 2018). Lebih lanjut, jika aset tidak terkelola dengan optimal, justru akan menambah beban biaya karena beberapa aset membutuhkan biaya pemeliharaan dan terjadi penyusutan.

Fenomena tersebut penting untuk diteliti, melihat adanya kesenjangan antara ketentuan dan aturan terkait pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam PP No. 28/2020 dan Permendagri No. 19/2016, dengan realita pengelolaan BMD di lapangan (pemerintah daerah) yang masih terdapat penyelewengan dan permasalahan serta selalu menjadi temuan BPK setiap tahunnya.

Poae *et al.* (2017) dalam Anisykurlillah dan Oktaviana (2020) mengemukakan bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan faktor penting untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah. Tata kelola aset daerah yang tidak efektif akan menurunkan kualitas laporan barang milik daerah, yang nantinya tidak mencukupi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 479 ayat (3)

menjelaskan bahwa laporan barang milik daerah akan digunakan untuk menyusun neraca tahunan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola aset yang baik dan benar agar dihasilkan pula laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian ini akan dilakukan pada Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, mengingat juga terjadi penyimpangan dan permasalahan aset serta belum adanya penelitian sejenis dengan metode kuantitatif yang dilakukan di lokasi tersebut. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, ditemukan beberapa kelemahan terkait pengelolaan aset. Salah satunya ialah belum adanya dokumen perjanjian kerjasama sewa dalam kegiatan pemanfaatan aset tetap dengan pihak ketiga. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian daerah karena terdapat potensi kurangnya penerimaan daerah. Kondisi tersebut melanggar ketentuan BAB VII tentang Pemanfaatan, pasal 129 terkait perjanjian sewa pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Selain itu, terdapat pula kelemahan berupa pengelolaan aset daerah yang belum tertib, dimana inventarisasi atas aset peralatan dan mesin senilai Rp2.632.542.774,00 tidak diketahui keberadaannya. Kondisi ini dapat menimbulkan potensi kehilangan aset disebabkan adanya aset peralatan dan mesin yang keberadaannya tidak diketahui. Masalah tersebut melanggar ketentuan terkait pengelolaan BMD yang tercantum dalam BAB XIII



mengenai Penatausahaan pasal 476 Permendagri No. 19/2016 yaitu inventarisasi aset yang belum lengkap.

Lebih lanjut, di Kabupaten Pelalawan juga masih ditemukan permasalahan terkait aset bergerak yang masih dikuasai pihak lain yang sudah tidak memiliki kewenangan. Dalam kasus ini, beberapa mantan anggota DPRD Pelalawan masih memakai kendaraan dinas, padahal status mereka sudah tidak lagi menjabat (kumparan.com, 2021). Hal ini memungkinkan penyelenggaraan tugas di OPD terkait akan terhambat akibat berkurangnya aset kendaraan. Kondisi tersebut melanggar ketentuan BAB VI tentang Penggunaan Aset, dimana pengguna barang harus mengembalikan BMD apabila sudah tidak berguna dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya pengelolaan aset di Kabupaten Pelalawan khususnya dalam hal pengendalian internal terkait aset dan inventarisasi aset, serta kualitas aparatur pemerintah daerahnya yang belum mengoptimalkan kinerja pengelolaan BMD.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah yang pernah diteliti sebelumnya yaitu perencanaan, inventarisasi, sistem pengendalian internal, kualitas SDM, penilaian, legal audit, Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah, komitmen pemimpin, dan budaya organisasi (Asman *et al.*, 2016; Ratmono dan Rochmawati, 2018; Hartati *et al.*, 2019; Syaifudin *et al.*, 2020; Anisykurlillah dan Oktaviana, 2020; Leky *et al.*, 2020; Sriasiti *et al.*, 2020). Namun pada penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan 3 faktor yang aktual dan relevan dengan fenomena di lokasi

penelitian yang diyakini berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Variabel tersebut yakni inventarisasi, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal.

Variabel inventarisasi, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian internal memiliki urgensi untuk diuji kembali mengingat adanya inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu seperti pada riset Ratmono dan Rochmawati (2018) dan Sriasiti *et al.*, (2020). Hasil yang tidak konsisten tersebut dapat disebabkan oleh pendekatan teori dan teknik analisis data yang kurang sesuai. Selain itu, ketiga variabel ini memiliki hubungan yang erat terhadap pengelolaan aset daerah. Siregar (2004) dalam Hartati *et al.*, (2019) menyatakan bahwa inventarisasi merupakan tahapan penting yang harus ada untuk meningkatkan pengelolaan aset. Sementara itu, menurut Kurniati *et al.*, (2017) SDM merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Serta variabel pengendalian internal juga sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan pemda terhadap regulasi terkait dengan pengelolaan BMD (Anisykurlillah dan Oktaviana, 2020). Dengan demikian, perlu dilakukan pengujian kembali atas ketiga variabel tersebut supaya dapat memperkuat hasil temuan dari variabel-variabel yang diteliti.

Inventarisasi aset merupakan aktivitas mendata, mencatat, dan melaporkan hasil pendataan barang milik daerah (Permendagri, 19/2016). Menurut Siregar (2004) dalam Hartati *et al.*, (2019), kegiatan yang dilakukan dalam inventarisasi meliputi pendataan, kodifikasi/*labling*, pengelompokan, dan

administrasi/pembukuan yang disesuaikan dengan tujuan manajemen aset. Hasil penelitian Asman *et al.*, (2016), Ratmono dan Rochmawati (2018), dan Hartati *et al.*, (2019), menemukan bahwa inventarisasi memiliki pengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset daerah. Inventarisasi yang baik dapat memberikan informasi BMD (aset daerah) secara lengkap dan *ter-update*. Inventarisasi yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi terbukti mampu meningkatkan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Sementara itu, temuan Sriastiti *et al.*, (2020) menyatakan bahwa inventarisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset.

Selanjutnya, variabel kompetensi aparatur juga diduga menjadi faktor yang krusial dalam meningkatkan pengelolaan barang milik daerah. Manajemen aset membutuhkan kompetensi yang sesuai dengan tugas, termasuk pengetahuan, keterampilan, pengalaman, perilaku, sikap, dan sifat yang sesuai (Hastings, 2010:23) dalam (Leky *et al.*, 2020). Lebih lanjut, dengan kemampuan yang mengacu pada kualitas sumber daya manusia yang baik, maka fungsi manajemen aset juga akan dapat dijalankan dengan baik.

Temuan Kurniati *et al.* (2017), Ekayanti *et al.*, (2018), Syaifudin *et al.* (2020), dan Leky *et al.*, (2020) menyatakan bahwa kompetensi dari aparatur berpengaruh positif terhadap pengelolaan BMD. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa semakin kompeten aparatur daerah maka kinerja pengelolaan BMD menjadi lebih optimal. Berbeda halnya dengan Ratmono dan Rochmawati (2018) yang menemukan bahwa kualitas SDM tidak memiliki pengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan BMD.

Pengendalian internal juga diduga dapat memengaruhi optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal dilakukan sebagai tindakan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi termasuk untuk mencapai pengamanan aset daerah. Demi menjamin kelancaran pengelolaan aset daerah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, peran pengawasan sangat penting untuk menjamin terselenggaranya penatausahaan aset daerah secara tertib (Syarifudin *et al.*, 2020). Hasil penelitian Astini (2018), Syarifudin *et al.* (2020), dan Anisykurlillah dan Oktaviana (2020) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap manajemen aset daerah. Dengan demikian, semakin baik implementasi pengendalian internal, maka semakin baik pula pengelolaan aset daerahnya (Ekayanti *et al.*, 2018).

Topik ini penting untuk diteliti karena berdasarkan fakta di lapangan, pengelolaan aset daerah di Indonesia masih belum optimal dan masih menjadi permasalahan yang selalu ditemukan oleh BPK setiap tahunnya. Sehingga, perlu untuk mengetahui faktor apa saja yang terbukti secara ilmiah dapat menunjang optimalisasi pengelolaan aset daerah. Implikasinya, setelah mengetahui faktor-faktor yang secara signifikan berpengaruh pada optimalisasi pengelolaan aset, pemerintah daerah dapat memaksimalkan faktor-faktor tersebut untuk memperbaiki pengelolaan aset daerahnya.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu dan temuan fenomena di atas, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Pengendalian Internal terhadap Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik**

**Daerah**". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Pelalawan. Secara rinci, penelitian ini mencoba menganalisis sejauh mana pengaruh inventarisasi, kompetensi aparatur, dan pengendalian internal terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh inventarisasi terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi aparatur terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh inventarisasi terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap optimalisasi pengelolaan barang milik daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **Manfaat Teoritis**

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam studi yang berkaitan pengelolaan barang milik daerah (BMD), terkhusus untuk penanganan berbagai permasalahan pengelolaan BMD yang masih sering terjadi.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam wawasan serta pengetahuan penulis mengenai pengelolaan BMD supaya nantinya dapat diterapkan dalam dunia kerja.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan BMD.

##### **Manfaat Praktis**

1. Bagi praktisi, khususnya pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, saran, dan bahan evaluasi yang



bermanfaat bagi perbaikan dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) untuk tercapainya *good governance* dalam pemerintah daerah.